



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Maret 2026

Inspektur,

Ferino Romiko, S.STP.,M.Si.

Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG
2025 M**

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan kebudayaan Kota Padang Panjang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2025.

Sebagai sektor penting dalam pembangunan Kota Padang Panjang, maka diperlukan penanganan serius secara terus menerus sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dinas teknis menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan tekad menjadikan Padang Panjang sebagai kota pendidikan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi rakyat dan didukung dengan berbagai upaya dibidang pendidikan sebagaimana yang termuat dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Padang Panjang.

Secara umum, dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan berbagai program masih ditemui adanya permasalahan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, ketersediaan sarana pendukung masih terbatas. Sedangkan secara eksternal, kurang terlaksananya program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih disebabkan alasan teknis dan aturan hukum yang menjadi landasan untuk dilaksanakannya suatu kegiatan.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG ,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) ini adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2025-2029.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2025 sebagai berikut :

❖ Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan:

Meningkatkan kualitas, akses pendidikan dan pengamalan nilai-nilai agama serta adat dalam kehidupan masyarakat” dengan Indikator Tujuannya adalah “Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah” dengan target tahun 2025 sebesar 12.16% dan 15.67%, dan Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan serta Persentase objek pemajuan kebudayaan

❖ Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan dan kebudayaan terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama yaitu
 - a. Literasi sederajat
 - b. Numerasi SD sederajat
 - c. Literasi SMP sederajat
 - d. Numerasi SMP sederajat
 - e. Keamanan, SD sederajat
 - f. Kebhinekaan SD sederajat
 - g. Inklusifitas SD sederajat
 - h. Keamanan SMP sederajat
 - i. Kebhinekaan SMP sederajat
 - j. Inklusifitas SMP sederajat
 - k. Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan
2. Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase warisan budaya yang dilestarikan

3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator sebagai berikut:

Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- ❖ Indikator sasaran kinerja secara umum telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Upaya mencapai Tujuan dan sasaran diatas dilakukan perbaikan sarana prasarana pendidikan sehingga akses pendidikan akan mudah dijangkau yang berdampak terhadap peningkatan mutu dan akses pendidikan kota Padang Panjang. Juga dilakukan kegiatan literasi dan numerasi terhadap siswa yang baru untuk melek membaca dan cakap berhitung. Pencapaian urusan kebudayaan dilakukan pengenalan warisan budaya benda dan tak benda kepada masyarakat kota Padang Panjang melalui kegiatan Galanggang Arang di area Stasiun Kereta Api Padang Panjang.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja disebabkan :

- a. Adanya kesadaran masyarakat Kota Padang Panjang untuk mengakses sekolah yang ada di Kota Padang Panjang.
- b. Daya Tampung sekolah mencukupi untuk akses anak-anak Padang Panjang.
- c. Banyak anak luar Padang Panjang yang sekolah di Padang Panjang.
- d. Adanya kepedulian ninik mamak dan pelaku budaya di Padang panjang.
- e. Adanya gerakan GSMS (gerakan seniman Masuk Sekolah)

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain:

- a. Belum adanya kerjasama dengan Kemenag Kota Padang Panjang mengenai data Pendidikan.
- b. Akses pendidikan masih terpusat di tengah kota
- c. Akses adat dan serta pelaku budaya masih sedikit.
- d. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Upaya mengatasi kendala atau faktor penghambat diatas adalah meningkatkan kembali koordinasi dan saling tukar data antara OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemenag Kota Padang Panjang, juga perbaikan dan pemerataan akses terhadap sekolah sekolah yang ada dipinggiran kota.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama dengan kemenag Kota Padang Panjang
2. Akses pendidikan untuk kota Padang Panjang.
3. Perlu peningkatan akses pelaku budaya di Padang Panjang.
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya

Evaluasi kinerja tahun 2025 ini menjadi landasan untuk target kinerja masa yang akan datang. Kinerja tahun depan harus mempedomani evaluasi dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemajuan pendidikan dan kebudayaan kota Padang Panjang adalah tanggung jawab semua masyarakat yang dilaksanakan pemerintah kota serta unsur dinas pendidikan dan kebudayaan. Tindakan yang harus dihadapi sebagai berikut:

1. Perubahan dinamika pendidikan harus segera disikapi oleh daerah
2. Perlu dukungan dana untuk pendidikan
3. Perlu adanya keterbukaan informasi public.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1
C. Sumber Daya Manusia	9
D. Aspek Strategis Organissi	10
E. Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	32
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Permasalahan dan Kendala	42
C. Strategi Pemecahan Masalah	42
D. Rekomendasi	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dasar penyusunannya adalah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai pertanggungjawaban urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, maka pelaporan kinerja Instansi Pemerintah, Perlu ditindak lanjuti dengan menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, ke budaya dan bidang sarana prasarana pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan bidang sarana prasarana pendidikan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan bidang sarana prasarana pendidikan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. Pengelolaan manajemen bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan bidang sarana prasarana pendidikan;
- g. Pelaksanaan proses perizinan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Kelompok Jabatan fungsional dan atau Pelaksana
2. Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
 - a. Kelompok Jabatan fungsional dan atau Pelaksana
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - a. Kelompok Jabatan fungsional dan atau Pelaksana
4. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - a. Kelompok Jabatan fungsional dan atau Pelaksana

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2, mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kebudayaan, bidang sarana dan

- prasarana pendidikan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta bidang sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kebudayaan serta bidang sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pelaksanaan urusan organisasi, pengelolaan kepegawaian, dan tata laksana;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan dasar, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan dasar, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - g. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - h. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kebudayaan serta bidang sarana dan prasarana pendidikan;
 - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

- l. penyelenggaraan pengarahannya pelaksanaan;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
2. Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Bidang pembinaan kebudayaan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pelestarian komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pelestarian komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- d. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
- j. penyusunan bahan fasilitasi serta pemantauan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,

pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan;

- k. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- l. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- m. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- n. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- o. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- q. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

3) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang pembinaan pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan dan

- sarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - g. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - h. Penyusunan bahan penerbitan izin penataan dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - i. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - j. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - l. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

4) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Bidang sarana dan prasarana pendidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kebudayaan dan pendidikan non formal;
- c. penyiapan bahan analisis kebutuhan sarana prasarana sekolah berdasarkan kebutuhan pendidikan;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
- e. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pada bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, serta bidang pembinaan pendidikan dasar termasuk pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

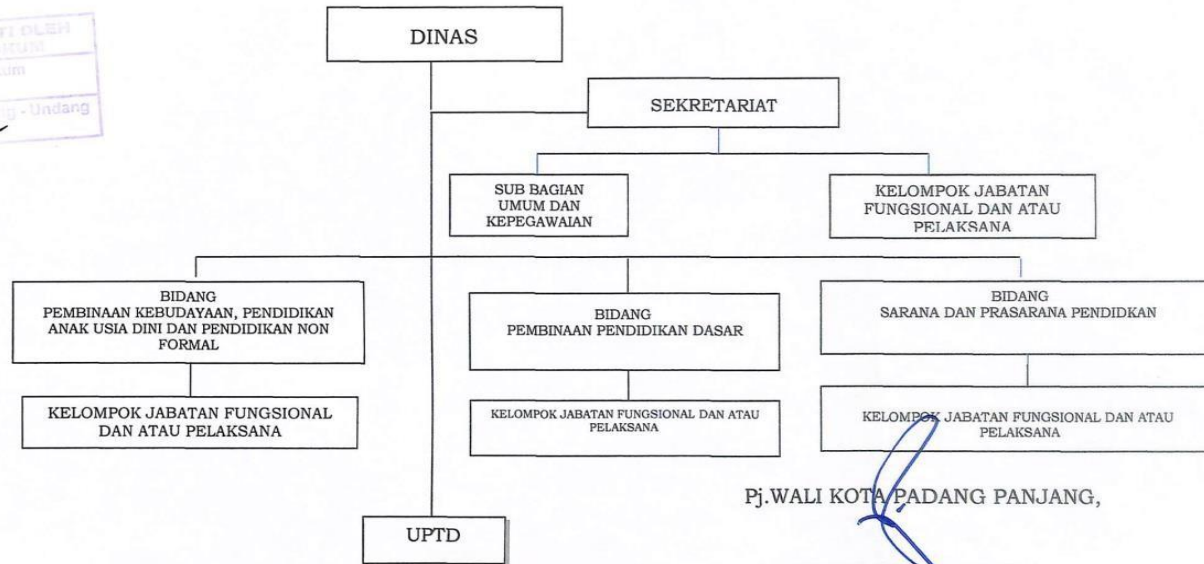
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	NAMA	PARAF
	Pj. sdb	W. M. M.	[Signature]
	Ass 3	M. A. S.	[Signature]
	Ket. Dinas	T. M. W.	[Signature]

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TELAH DITELITI OLEH
 BAGIAN HUKUM
 KANTOR WALI KOTA
 Padang - Undang



Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

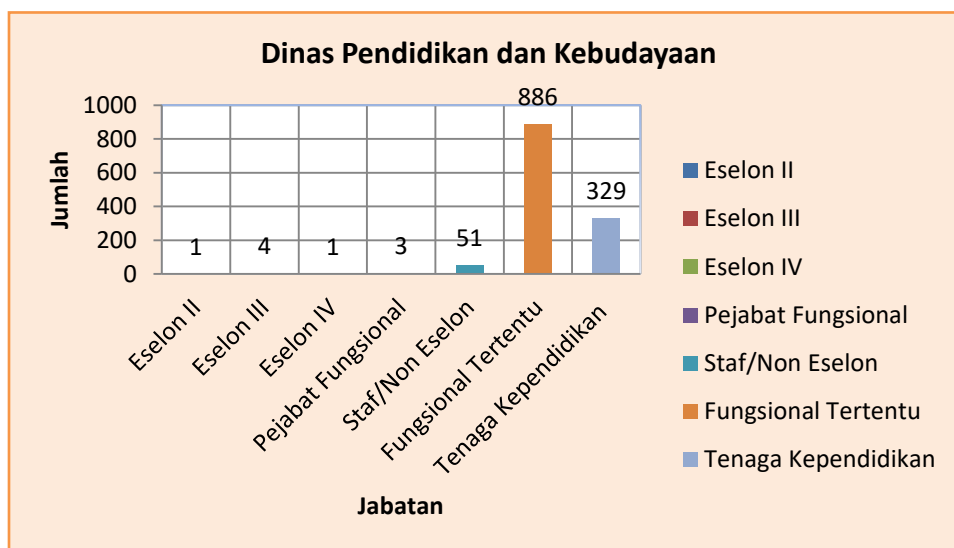
SONNY BUDAYA PUTRA

C. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

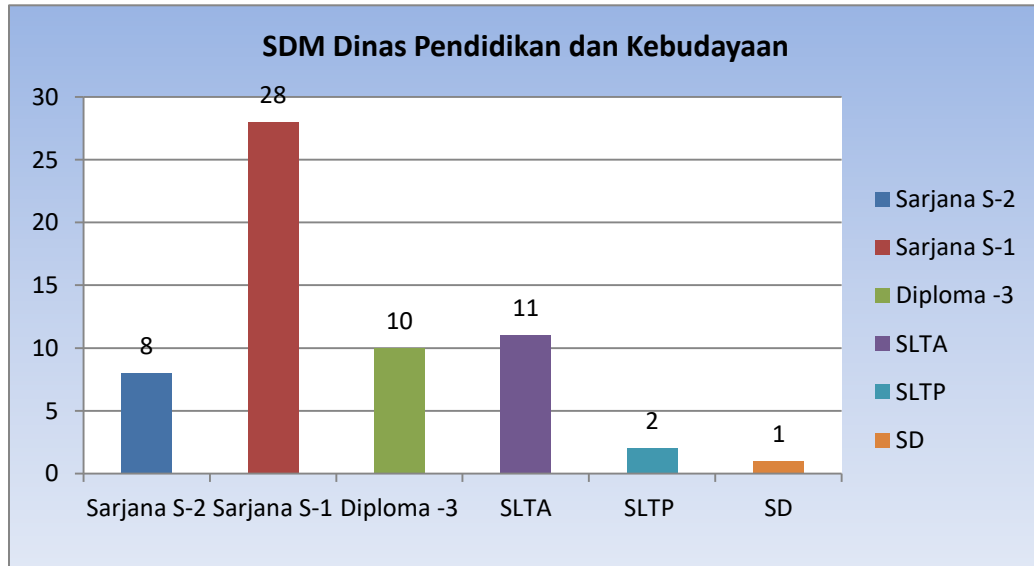
Pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1) Kondisi Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai struktur organisasi sesuai dengan SOTK di atas. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:



Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:



D. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai pusat kegiatan Kota Padang Panjang mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi, maupun social. Ditambah lagi dengan fungsi Kota Padang Panjang sebagai pusat pendidikan, berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Padang Panjang memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan, social budaya di Kota Padang Panjang.

E. Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu strategis tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kota Padang Panjang antara lain pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable*

Development Goals/SDGs), untuk menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan, suatu kondisi atau keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang diperoleh baik dari analisis internal maupun eksternal yaitu :

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Meratanya satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (Rapor Pendidikan)	100	16.67
2	Sarana dan prasarana untuk setiap jenjang pendidikan masih terbatas	100	16.67
3	Belum optimalnya proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya dalam bidang seni, budaya, dan bahasa,	100	16.67
4	Belum optimalnya literasi dan numerasi peserta didik.	95	15.83
5	Digitalisasi dalam Pendidikan dan Kebudayaan	95	15.83
6	Belum optimal penggunaan Objek Pemajuan kebudayaan lokal sebagai media pembelajaran yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa.	100	16.67

F. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inspektorat

Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penyelarasan kembali sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja ada Renstra, renja dan perjanjian kinerja OPD
2. Seluruh sasaran strategis memiliki hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/ hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*)
3. Telah mencantumkan target kinerja triwulan setiap level jabatan sehingga dapat diukur capaiannya secara berkala.
4. Telah melakukan penyesuaian strategi, kebijakan dan aktifitas dalam capaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang disusun untuk menjawab pertanyaan; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh OPD agar tujuan tercapai. Dalam perjalanannya, rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan adanya perubahan terhadap RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 yang disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Substansi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang mengalami perubahan meliputi gambaran pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; permasalahan dan isu-isu strategis; tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan; Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk mencapai program dan kegiatan tahun 2025, Tujuan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Padang Panjang adalah Meningkatnya kualitas, akses pendidikan dan pengamalan nilai-nilai agama serta adat dalam kehidupan masyarakat. Guna mewujudkan tujuan ini didasari pada indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah serta Persentase SPM urusan Pendidikan.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2025-2029 terlihat pada tabel dibawah ini.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
S1.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas, akses pendidikan dan pengamalan nilai-nilai agama serta adat dalam kehidupan masyarakat		Harapan Lama Sekolah	15.67	15.85	16.02	16.19	16.37	16.54	
S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat			Rata-Rata lama Sekolah	12.16	12.30	12.43	12.57	12.70	12.84	
			Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	100	100	100	100	100	100	
			Persentase objek pemajuan kebudayaan	66,60	67,22	67,84	68,46	69,08	69,70	
		1. Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing	Literasi SD Sederajat	92.11	93.11	94.11	95.11	96.11	96.15	

S1.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Meningkatny a kualitas, akses pendidikan dan pengamalan nilai-nilai agama serta adat dalam kehidupan masyarakat		Harapan Lama Sekolah	15.67	15.85	16.02	16.19	16.37	16.54	
S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat			Rata-Rata lama Sekolah	12.16	12.30	12.43	12.57	12.70	12.84	
			Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	100	100	100	100	100	100	
			Persentase objek pemajuan kebudayaan	66,60	67,22	67,84	68,46	69,08	69,70	
		1. Meningkatny a akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Literasi SD sederajat	92.11	93.11	94.11	95.11	96.11	96.15	
			Numerasi SD sederajat	75.56	76.56	77.56	78.56	79.56	79.60	
			Literasi SMP sederajat	82.30	83.30	84.30	85.30	86.30	86.35	
			Numerasi SMP sederajat	62.25	63.25	64.25	65.25	66.25	66.30	
			Keamanan SD	76.91	77.91	78.91	79.91	79.93	79.95	

			sedera							
			Kebhinekaan SD sederajat	76.41	77.41	78.41	79.41	79.43	79.45	
			Inklusifitas SD sederajat	61.13	62.13	63.13	64.13	64.14	64.15	
			Keamanan SMP sederajat	74.43	75.43	76.43	77.43	77.45	77.46	
			Kebhinekaan SMP sederajat	72.45	73.45	74.45	75.45	75.46	75.47	
			Inklusifitas SMP sederajat	59.72	60.72	61.72	62.72	62.74	62.75	
			Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	55	56	57	58	60	60	
		2. Meningkatkan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase Pelestarian objek pemajuan kebudayaan	75.00	75.10	75.25	75.45	75.55	75.57	
		3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.50	68.92	71.68	74.48	77.27	79.67	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perangkat daerah melaksanakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

VISI: Padang Panjang Kota Serambi Mekah Yang Maju, Sejahtera Dan Bermarwah			
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas, Kreatif Dan Inovatif, Berakhlak Dan Berdaya Saing Tinggi			
MISI 4: Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas, akses pendidikan dan pengamalan nilai-nilai agama serta adat dalam kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan profesi guru yang berkelanjutan (upgrading untuk guru -grade A,B,C) 2. Pengembangan kurikulum yang inovatif, bermuatan lokal, yang berbasis agama, adat dan budaya lokal dengan meningkatkan peran serta pemangku agama dan adat dalam dunia pendidikan 3. Pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi 4. Kolaborasi Antar Sektor untuk meningkatkan mutu Pendidikan (Negeri & Swasta) 5. Mengembangkan sistem informasi pendidikan dan pengelolaan data pendidikan 6. Penanganan Angka Putus Sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 2. Implementasi kurikulum merdeka belajar di SD dan SMP 3. mengembangkan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan digital, dan peningkatan literasi berbasis masyarakat 4. Pemberian program beasiswa bagi anak berprestasi. (PAUD, SD dan SMP) 5. Satu aplikasi dalam Penerimaan Peserta didik baru baik negeri maupun swasta. 6. Pengelolaan data Dapodik Pendidikan 7. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan

		<p>kewenangan Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pemerataan akses terhadap Pendidikan melalui aspek sarana dan prasarana pendidikan 8. Pengembangan SMP Boarding School 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan 10. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu 11. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu 12. Pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP bagi siswa kurang mampu 13. Pembangunan Sarana Learning Knowledge Center/ Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Teknologi 14. Pembentukan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di setiap kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Penanganan anak putus sekolah SD, SMP dan SLTA. 9. Pengembangan salah satu SMP (SMPN6) menjadi sekolah Boarding School 10. Penyediaan dan rehabilitasi sekolah TK, SD dan SMP 11. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang ampu 12. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu 13. Pemberian seragam sekolah dan ATK bagi siswa SD dan SMP bagi yang kurang mampu 14. Pembangunan sarana IT SD dan SMP 15. Pembentukan PKBM dan di setiap kelurahan
	2. Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta lembaga dan pemangku adat dalam Kehidupan masyarakat 2. Meningkatkan pelestarian seni dan permainan tradisional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Seniman masuk sekolah masyarakat 2. KAN Mengajar 3. Pemanfaatan WBTB 4. Pemanfaatan WT BOS

		3. Optimalisasi pelestarian nilai-nilai adat dan budaya 4. Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan	5. Pemeliharaan dan Pengajuan Cagar Budaya.
	3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Transparansi Program dan kegiatan

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. GATOT SUBROTO RT.8 KEL. NGALAU NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com kode pos 27124

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUL, SH. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRI ARNIS

Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,
2025

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

Padang Panjang,
2025

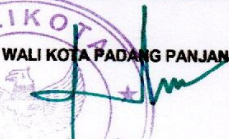
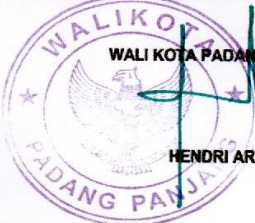
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG



NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,7%	1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Literasi dan Numerasi SD sederajat	92.11 dan 75.56
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	97,5%			Literasi dan Numerasi SMP sederajat	82.30 dan 62.25
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	61%			Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.76.91
		APK PAUD (3-6 tahun)	49%				b.76.41
		APK SD sederajat	106,50%				c.61.13
		APK SMP sederajat	107%			a.74.43	
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	90.11 dan 72.56			Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	b.72.45
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	80.30 dan 60.25				c.59.72
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.74.91			Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	55.00%
			b.73.41				
Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	a.72.43						
	b.70.45						
2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	55%	2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase objek pemajuan kebudayaan	75.00%
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	65%				
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55%				
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya	60%				
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67.50
No	Program	Anggaran		Keterangan			
		Sebelum	Sesudah				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77,131,784,257.00	73,319,697,839.00				
2	Program Pengelolaan Pendidikan	31,405,788,702.00	37,522,975,356.00				
3	Program Pengembangan Kebudayaan	736,776,000.00	643,712,000.00				
	Jumlah	109,274,348,959.00	111,486,385,195.00				


WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 2025
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG**


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 199916151669031003

Perubahan target Perjanjian kinerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk mengakomodir perubahan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode 2025-2029. Realisasi dari indikator yang telah ditargetkan akan menentukan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

SASARAN 1 : Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 1.1
Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Per Sasaran)

No .	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	T arget	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Literasi SD Sederajat	92.11	87.76	95.28%
		Numerasi SD Sederajat	75.56	83.21	110.12%
		Literasi SMP Sederajat	82.30	92.23	112.07%
		Numerasi SMP Sederajat	62.25	88.85	142.73%
		Keamanan SD sederajat	76.91	80.03	104.06%
		Kebhinekaan SD sederajat	76.41	74.87	97.98%
		Inklusifitas SD sederajat	61.13	61.74	101.00%
		Keamanan SMP sederajat	74.43	70.76	95.07%
		Kebhinekaan SMP sederajat	72.45	69.76	96.29%
		Inklusifitas SMP sederajat	59.72	60.61	101.49%

		Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	55	55	100.00%
--	--	---	----	----	---------

Pencapaian indikator kinerja sasaran, dapat diuraikan sebagai berikut :

Pencapaian Indikator kinerja seperti pada tabel diatas menunjukkan data kinerja bidang pendidikan untuk kota Padang Panjang sesuai dengan Rapor Pendidikan yang di keluarkan oleh Kemendikdasmen RI.

Untuk tahun 2025 Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan dengan 11 indicator kinerja secara umum telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada Literasi SD dengan target 92.11% realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 87.76% dengan persentase capaian adalah 95.28 %. Terjadinya penurunan realisasi ini akibat Kurangnya Budaya Membaca di Rumah, Orang tua jarang membacakan buku atau memperlihatkan aktivitas membaca di depan anak. Minimnya Pendampingan: Orang tua yang terlalu sibuk seringkali menyerahkan sepenuhnya urusan belajar ke sekolah tanpa memantau perkembangan membaca anak. Kondisi Perpustakaan yang Kurang Menarik: Perpustakaan seringkali hanya menjadi gudang buku paket yang membosankan, gelap, atau tidak terawat. Pada indikator keamanan dan kebhinekaan SD

Tabel 2.1

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berikutnya:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025				
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkat dan terjaminnya mutu pendidikan	APK SD/MI/Paket A	114.91%	105.45%	91.77	104.86%	104.86%	100.00	-	-	-	-	-	-		
		APM SD/MI/Paket A	99.41%	99.03%	99.62	96.61%	96.61%	100.00	-	-	-	-	-	-		
		APK SMP/MTS/Paket B	104.90%	95.06%	90.62	101.57%	107.25%	105.59	-	-	-	-	-	-		
		APM SMP/MTS/Paket B	85.07%	79.26%	93.17	86.07%	85.66%	99.52	-	-	-	-	-	-		
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	-	-	-	-	-	-	99,6%	99.05%	99.45%	-	-	-		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	-	-	-	-	-	-	97,4%	98.53%	101.16%	-	-	-		
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	-	-	-	-	-	-	60%	62.95%	104.92%	-	-	-		
		APK PAUD (3-6 tahun)	-	-	-	-	-	-	48%	42.28%	100%	-	-	-		
		APK SD sederajat	-	-	-	-	-	-	106,20%	105.50%	88.08%	-	-	-		
		APK SMP sederajat	-	-	-	-	-	-	107,5%	109.31%	101.68%	-	-	-		
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	-	-	-	-	-	-	89.11 dan 71.56	89.34 dan 78.57	100.25 dan 109.79	92.11 dan 75.56	87.76 dan 83.21	95.28% dan 110.12%		
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	-	-	-	-	-	-	79.30 dan 56.78	91.09 dan 86.45	114.86 dan 490.86	82.30 dan 62.25	92.23 dan 88.85	112.07 % dan 142.73%		
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	-	-	-	-	-	-	a.73.91	76.37	103.33	76.91	80.03	104.06%		
			-	-	-	-	-	-	b.72.41	75.38	104.10	76.41	74.87	97.98%		
			-	-	-	-	-	-	c.58.13	60.71	104.44	61.13	61.74	101.00%		
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	-	-	-	-	-	-	a.71.43	73.15	102.41	74.43	70.76	95.07%		
			-	-	-	-	-	-	b.69.45	74.71	107.57	72.45	96.76	96.29%		
-	-	-	-	-	-	-	c.56.72	60.82	107.23	59.72	60.61	101.49%				
		Persentase standar sarana prasarana satuan pendidikan									0	0	0.00	55	55	100%

Dilihat dari tabel diatas terjadi perubahan indikator dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Perubahan itu disebabkan adanya perubahan renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari renstra 2024-2026 ke renstra 2025-2029. Perubahan ini mengakomodir perubahan RPJMD kota Padang Panjang tahun 2025-2029.

Terjadinya perubahan target pada indicator pada tahun 2025 diatas dari tahun lalu telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan target diatas mengakomodir rapor pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi RI.

SASARAN 2. Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat dengan 1 indikator kinerja sasaran, Persentase warisan budaya yang dilestarikan memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja dengan predikat Memuaskan.

Tabel 1.2

Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Per Sasaran)

No	Sasaran	Indikaator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	75.00%	80%	106.67%

Pencapaian target 106.67% dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang
Tahun 2025

No	Nama OPK	Kegiatan Pelestarian	Ket
1	Tradisi lisan	Bertutur bahasa daerah dengan kegiatan pasambahan adat minangkabau untuk siswa SMP Kota Padang Panjang	
2	Manuskrip	-	
3	Adat Istiadat	Pembelajaran hubungan kekerabatan dan hubungan kelarasan di minangkabau dn wokshop sistem perkawinan di padang panjang	
4	Ritus	Batagak batu (Prosesi) dan revitalisasi perayaan perkawinan di minangkabau.	
5	Pengeahuan Tradisional	Proses penggantian Imam Qhadi di Masjid Asasi Padang Panjang dan workshop WBTB	
6	Teknologi Tradisional	Pengenalan Lesung, bendi dan kincia kepada siswa SD dan SMP di Padang Panjang	
7	Seni	Pelaksanaan Antraksi kesenian siswa SD dan SMP Kota Padang Panjang	
8	Bahasa	-	
9	Permainan Rakyat	Festival alang-alang di Kubu Gadang Padang Panjang	
10	Olahraga Tradisional	Penyusunan Kajian Silek tuo Gunuang	

Dari 10 OPK di kota Padang Panjang ada 2 OPK yang belum bisa dilestarikan, yaitu Manuskrip dan Bahasa. Kedua OPK ini belum bisa dilestarikan karena belum ada Kuratorial/tenaga ahli untuk menyusun manuskrip ini. Banyak manuskrip yang disimpan oleh ahli waris yang enggan untuk didigitalisasi.

Pencapaian indikator kinerja sasaran ini, didukung oleh factor sebagai berikut :

1. Adanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang di ikuti oleh siswa siswi SD dan SMP Kota Padang Panjang yang dibina oleh Tim ISI Padang Panjang.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Bundo Kandung KAN Gunung, KAN Bukit Surungan dan KAN Lareh nan Panjang Kota Padang Panjang.
3. Pelatihan Pasambahan Manyerak Berek Kunyik diikuti oleh 3 KAN
4. Pemangku adat Masuk Sekolah yang mengenalkan adat ABS-SBK.
5. Adanya Lomba Membuat Gambar Bercerita Cagar Budaya di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.2

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berikutnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Mendorong peningkatan aktifitas adat dan budaya	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan di lembaga adat budaya Kota Padang Panjang.	250 orang	458 orang	183.20	460 orang	720 orang	156.52	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan aktifitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	49%	49%	100	-	-	-
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	-	-	-	-	-	-	60%	60%	100	-	-	-
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	50%	50%	100	-	-	-
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	-	-	-	-	-	-	54%	54%	100	-	-	-
Meningkatnya aktifitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00	80.00	106.67	

Terjadi perubahan indikator pada tahun 2025 menyesuaikan dengan renstra 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

SASARAN 3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kinerja Perangkat daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran, Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja dengan predikat Memuaskan.

Tabel 1.2

Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Per Sasaran)

No	Sasaran	Indikaator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya kinerja Perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	angka	67.50	69.60	103.11%

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berikutnya.

Sasaran Meningkatnya kinerja Perangkat daerah dengan indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum tercantum pada Renstra Perangkat Daerah tahun sebelumnya, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Tabel 3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Periode akhir Renstra)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)
1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Literasi SD Sederajat	87.76	79.56
		Numerasi SD Sederajat	83.21	86.3
		Literasi SMP Sederajat	92.23	66.25
		Numerasi SMP Sederajat	88.85	79.93
		Keamanan SD sederajat	80.03	79.43
		Kebhinekaan SD sederajat	74.87	64.14
		Inklusifitas SD sederajat	61.74	77.45
		Keamanan SMP sederajat	70.76	75.46
		Kebhinekaan SMP sederajat	69.76	62.74
		Inklusifitas SMP sederajat	60.61	60
		Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	55	75.55
2	Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	70	75.57
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	69.60	77.27

Dari tabel diatas realisasi tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir renstra perangkat daerah. Terjadinya perubahan target di akhir renstra karena:

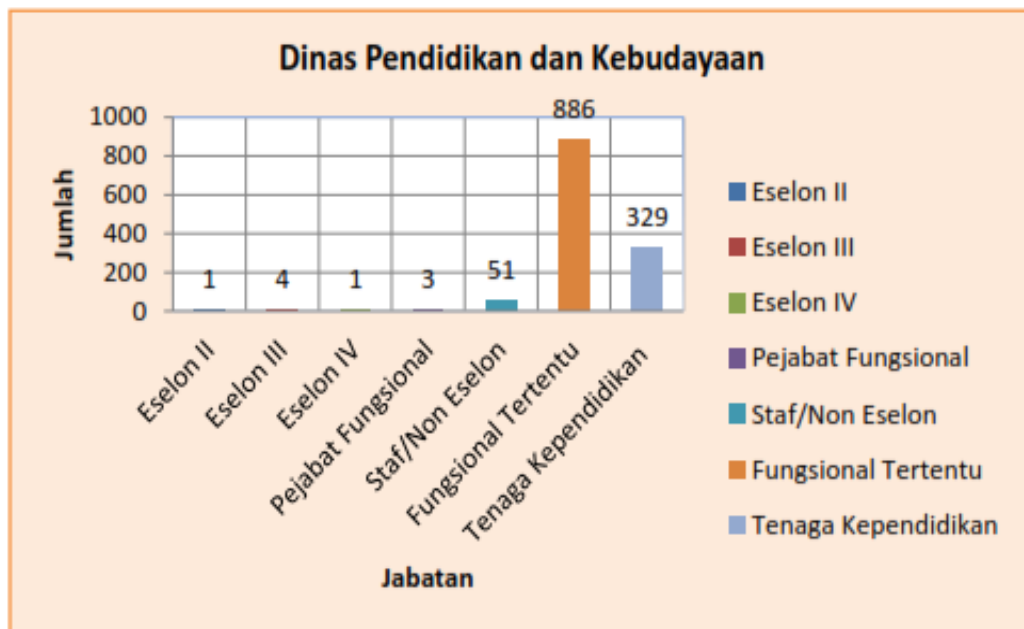
5. Adanya input siswa yang berbeda di setiap tahun ajaran, sehingga pengukuran kinerja disesuaikan dengan kondisi kekinian.
6. Perlu penyesuaian target di renstra baru untuk mengakomodir perubahan yang terjadi.

Pencapaian Indikator kinerja seperti pada tabel diatas menunjukkan adanya kinerja bidang pendidikan untuk kota Padang Panjang sesuai dengan Rapor Pendidikan yang di keluarkan oleh Kemendikdasmen RI. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja propinsi dan nasional, maka kota padang pajang telah melebihi target nasional, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	REALISASI NASIONAL	REALISASI PROVINSI
T1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	1 Indeks Pembangunan Manusia (angka)	81.5	81.32	75.90	77.3
	S1 Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat	1 Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12.16	12.01	9.09	9.77
		2 Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.67	15.74	14.31	13.30
		3 Persentase Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan (%)	100.00	100.00		

1. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah untuk urusan pendidikan, pencapaian ini berdasarkan kerja keras semua pihak yang mengampu pendidikan baik pemerintah maupun masyarakat. Pencapaian ini dilakukan dengan dukungan personil di Perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tabel dibawah ini.



Disamping keberhasilan pendidikan ada juga faktor yang perlu dibenahi.

Faktor penghambat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

2. Pengelolaan pendidikan di kota Padang Panjang terkendala oleh birokrasi yang masih panjang.
3. Dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan masih terbatas

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha- usaha sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama dengan kemenag Kota Padang Panjang
2. Akses pendidikan untuk kota Padang Panjang.
3. Perlu peningkatan akses pelaku budaya di Padang Panjang.
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya

2. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Pendidikan di Kota Padang Panjang, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- 1) Sumber Daya Manusia yang kompeten
- 2) Sumber Dana yang mencukupi
- 3) Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel Analisa Sumber Daya

No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
1	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
2	Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan.	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
3	Tercukupinya sarana prasarana kerja	Sarana dan prasarana yang mendukung	Kekurangan jumlah sarana dan prasarana sekolah	Pengadaan sarana prasarana perlu jadi prioritas

Efisiensi sumber daya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dilaksanakan sebagai wujud komitmen terhadap pendidikan di kota Padang Panjang. Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan, maka dapat dikatakan semakin efisien. Efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pemanfaatan sumber daya Manuasia Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pemanfaatan sarana prasarana pendidikan yang telah dibangun dengan dana alokasi umum yang ditentukan (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Untuk peningkatan kompetensi PTK banyak dibantu oleh UPT Kemendikdasmen diantaranya BBPMP sumbar di Padang dan BGTK Sumbar di Pariaman. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan kelmbangaan bagi sekolah, pengawas, pengelola dana BOS, operator Dapodik serta persiapan guru penggerak yang merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi pengawas dan Kepala Sekolah.

Dibidang perencanaan adanya rapor pendidikan sangat membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perencanaan yang akan datang. Pembiayaan yang dialokasikan untuk dinas pendidikan dan kebudayaan sebenarnya belum memadai untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah, tetapi atas bantuan semua pihak pembiayaan yang ada bisa meningkatkan pembinaan mutu pendidikan di Padang Panjang.

3. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian.

Evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025 ini menjadi landasan untuk target kinerja masa yang akan datang. Kinerja tahun depan harus mempedomani evaluasi dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemajuan pendidikan dan kebudayaan kota Padang Panjang adalah tanggung jawab semua masyarakat, yang dilaksanakan pemerintah kota dan unsur dinas pendidikan dan kebudayaan. Keberhasilan Program Pengelolaan Pendidikan dengan 4 kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 17,833,797,800 realisasi Rp. 15,982,482,930, atau 89.62 %.
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp.10,342,481,650 realisasi sebesar Rp. 9,010,169,058 atau 87.12%.
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp. 7,324,054,426 realisasi sebesar RP. 6,994,881,945 atau 95.15%
4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp. 2,022,641,480 realisasi sebesar Rp. 1,764,167,498 atau 87.22%

Dari kegiatan diatas Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp. 7,324,054,426 realisasi sebesar RP. 6,994,881,945 atau 95.15% adalah penyumbang realisasi anggaran terbesar pada urusan pendidikan kota Padang Panjang. Hal ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dengan realisasi sebesar 1.000.000 atau 100% dan sub kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan realisasi sebesar 1,317,334,300 atau 96.59%

Sedangkan penyumbang realisasi terkecil pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp.10,342,481,650 realisasi sebesar Rp. 9,010,169,058 atau 87.12%. hal ini dikarenakan ada kegiatan yang realisasinya sebesar Rp.98,896,065 atau 43.42% pada sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diakibatkan oleh adanya bencana yang terjadi di Padang Panjang Pada Akhir tahun 2025, Sehingga kegiatan tidak sempurna dilaksanakan oleh bidang pengampu kegiatan.

Pada kegiatan diatas tercapainya Angka Partisipasi sekolah yang menunjang SPM bidang Pendidikan. Angka partisipasi sekolah, akses sekolah bisa ditingkatkan dengan perbaikan sarana prasarana pendidikan. Disamping keberhasilan pendidikan terdapat tantangan yang harus dihadapi sebagai berikut:

- b. Perubahan dinamika pendidikan harus segera disikapi oleh daerah
- c. Perlu dukungan dana untuk pendidikan
- d. Perlu adanya keterbukaan informasi public.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

**Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang
(Kondisi TMT 31 Desember 2025)**

No	OPD	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	APBD, APBN	75,065,091,839	72,074,907,923	96.02%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		72,442,326,025	69,972,573,722	96.59%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		72,442,326,025	69,972,573,722	96.59%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		484,330,000	418,860,177	86.48%
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		484,330,000	418,860,177	86.48%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		330,624,238	275,079,256	83.20%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		12,645,900	12,059,040	95.36%

		Bangunan Kantor				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		69,161,138	67,120,640	97.05%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		38,453,200	25,644,850	66.69%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		210,364,000	170,254,726	80.93%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		150,611,800	83,842,000	55.67%
		Pengadaan Mebel		66,680,000	12,000,000	18.00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		49,931,800	49,842,000	99.82%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		34,000,000	22,000,000	64.71%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,028,499,776	819,060,418	79.64%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3,005,800	2,470,000	82.17%
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik		131,385,976	78,676,948	59.88%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		894,108,000	737,913,470	82.53%

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		628,700,000	505,492,350	80.40%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		194,288,000	85,689,350	44.10%
		Pemeliharaan Mebel		25,000,000	10,594,000	42.38%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9,740,000	9,560,000	98.15%
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		399,672,000	399,649,000	99.99%
		Program Pengelolaan Pendidikan		37,522,975,356	33,751,701,430	89.95%
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		17,833,797,800	15,982,482,930	89.62%
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3,327,242,100	2,849,617,381	85.65%
		Pengadaan Mebel Sekolah		290,000,000	285,935,112	98.60%
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		82,500,000	82,417,500	99.90%
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		305,000,000	304,175,598	99.73%

		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		131,423,800	91,952,700	69.97%
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		2,856,504,000	2,400,690,690	84.04%
		Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		532,846,900	317,782,499	59.64%
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		30,000,000	16,011,100	53.37%
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		5,611,750,000	5,469,914,334	97.47%
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		20,000,000	6,918,450	34.59%
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		20,000,000	3,338,250	16.69%
		Penyediaan infrastruktur TIK		93,886,000	92,907,000	98.96%
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		170,000,000	170,000,000	100.00%
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		136,890,000	129,715,950	94.76%
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3,804,600,000	3,446,754,816	90.59%
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		87,725,000	34,351,550	39.16%
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		333,430,000	280,000,000	83.98%

		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		10,342,481,650	9,010,169,058	87.12%
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		214,143,460	182,064,613	85.02%
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah		1,831,070,000	1,696,041,811	92.63%
		Pengadaan Mebel Sekolah		960,479,100	903,992,107	94.12%
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		84,150,000	82,417,500	97.94%
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		300,000,000	291,560,408	97.19%
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		267,990,000	195,991,400	73.13%
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		194,712,500	128,587,100	66.04%
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1,369,418,400	999,146,698	72.96%
		Pengembangan Karir Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		227,762,800	98,896,065	43.42%
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		3,871,500,000	3,761,780,776	97.17%

	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13,965,000	3,591,300	25.72%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20,000,000	10,549,300	52.75%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	270,000,000	0	0.00%
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	115,254,000	115,241,000	99.99%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	452,176,390	391,457,980	86.57%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30,000,000	29,970,000	99.90%
	Penyediaan infrastruktur TIK	119,860,000	118,881,000	99.18%
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7,324,054,426	6,994,881,945	95.51%
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	870,099,000	831,731,765	95.59%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1,000,000	1,000,000	100.00%
	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD	4,370,700,000	4,191,100,000	95.89%
	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD	343,776,600	311,014,470	90.47%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	49,870,000	27,605,220	55.35%

		Pengelolaan Dana BOP PAUD		1,363,800,000	1,317,334,300	96.59%
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		14,115,000	11,073,825	78.45%
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		15,760,000	14,209,675	90.16%
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		19,944,496	19,944,496	100.00%
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		175,000,000	170,701,114	97.54%
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		20,000,000	20,000,000	100.00%
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		79,989,330	79,167,080	98.97%
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2,022,641,480	1,764,167,498	87.22%
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		94,466,300	86,116,000	91.16%
		Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		34,651,500	20,382,603	58.82%
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		12,197,800	6,796,350	55.72%
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah		437,900,000	437,050,000	99.81%

		Nonformal/kesetaraan				
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan		7,677,850	4,350,300	56.66%
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang		12,143,850	10,870,175	89.51%
		Pembangunan Ruang Kelas		1,356,749,900	1,140,624,714.58	84.07%
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		66,854,280	57,977,355	86.72%
		Program Pengembangan Kebudayaan		643,712,000	600,964,100	93.36%
		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota		383,919,000	352,475,325	91.81%
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		383,919,000	352,475,325	91.81%
		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		88,769,000	87,272,325	98.31%
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		26,621,000	26,440,500	99.32%

		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		62,148,000	60,831,825	97.88%
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota		171,024,000	161,216,450	94.27%
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		151,524,000	141,776,450	93.57%
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		19,500,000	19,440,000	99.69%
		JUMLAH BELANJA		113,231,779,195	106,427,573,453.08	93.99%

Dari tabel diatas tergambar bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 mendapat alokasi anggaran di DPA Perubahan sebesar Rp. **113,231,779,195** dengan realisasi sebesar Rp. **106,427,573,453.08** . atau sebesar 93.99%. (Kondisii TMT 31 Desember 2025). Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 diakibatkan adanya pegerasan kegiatan yang yang substansial untuk penanggulangan bencana.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang mendapat alokasi anggaran di DPA Perubahan sebesar Rp. 121.193.194.828 dengan realisasi sebesar Rp. 115.449.558.615. atau sebesar 95.26%. (Kondisii TMT 31 Desember 2024) Terjadi penurunan persentase realiasi untuk tahun 2025, akibat bencana alam di kota Padang Panjang, sehingga ada kegiatan yang tidak bisa direalisasikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan Sekolah yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
2. Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang maupun sekolah secara keseluruhan.
3. Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 merupakan pengukuran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029.

B. Permasalahan dan kendala Utama

Disamping keberhasilan pendidikan ada juga faktor yang perlu dibenahi. Kendala Utama kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Pengelolaan pendidikan di kota Padang Panjang terkendala oleh birokrasi yang masih panjang.
2. Dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan masih terbatas
3. Terbatasnya SDM dan tenaga Ahli di bidang Kebudayaan .

dan Banggar DPRD kota Padang Panjang sebagai mitra pemerintah daerah. Untuk pemenuhan SDM Kebudayaan perlu adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi seni yang ada di Padang Panjang.

D. Rekomendasi

Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan antara lain :

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih baik dan antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan.
- b. Peningkatan kompetensi SDM meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dengan Dinas terkait baik tingkat Kota, Propinsi maupun Pusat.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG ,





**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. GATOT SUBROTO RT.8 KEL. NGALAU NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com kode pos 27124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUL, SH. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA

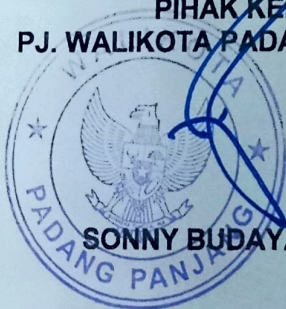
Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG**



SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 2 Januari 2025

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG**



**NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,7%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	98,55%
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	63%
		APK PAUD (3-6 tahun)	49%
		APK SD sederajat	106,10%
		APK SMP sederajat	109,45%
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	90.11 dan 78.60
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	91.15 dan 86.50
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.76.50 b.75.45 c.60.75
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	a.73.25 b.74.75 c.60.92
2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	55%
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	65%
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55%
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	60%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.131.784.257
2	Program Pengelolaan Pendidikan	31.405.788.702
3	Program Pengembangan Kebudayaan	736.776.000

WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Padang Panjang



Nasrul SH, M.Si
NIP. 196910151989031003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASRUL, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

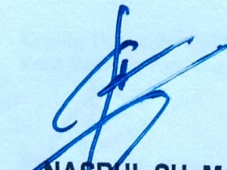
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

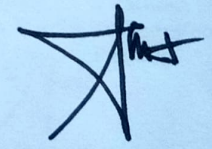
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 196910151989031003

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102142002121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	4	5
1	Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai Dilaksanakan	100%
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Selesai dilaksanakan	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77,131,784,257
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,166,140,209
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	494,530,000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	526,696,464
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169,540,300
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,050,191,284
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724,686,000

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Padang Panjang

NASEDUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

Padang Panjang, 2 Januari 2025
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Padang Panjang

MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102142002121004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVAL JERRI, S.KOM. M.PdT

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASRUL, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

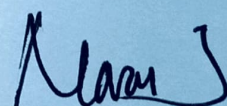
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 196910151989031003

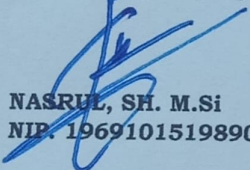

NOVAL JERRI, S.KOM. M.PdT
NIP. 198111072005011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	4	5
	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan		
1	Terkelolanya Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan
2	Terkelolanya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan

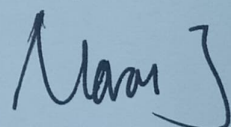
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10,033,722,000
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6,405,183,400

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Padang Panjang


NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar


NOVAL JERRI, S.KOM. M.PdT
NIP. 198111072005011003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFYENI, S.Pd, M.Pd

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN, PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASRUL, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

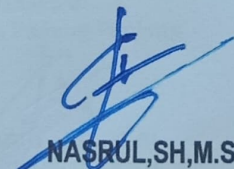
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

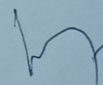
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pihak Pertama
**Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, PAUD
Dan Pendidikan Pendidikan Non Formal**


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 196910151989031003


SOFYENI, S.Pd, M.Pd
NIP. 197503252006042002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN, PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	4	5
1	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan		
	1	Terkelolanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola 58 satuan pendidikan
	2	Terkelolanya Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola 3 satuan pendidikan
2	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina		
	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola 2 Objek
	2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan 3 Nagari
	3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina 3 lembaga

No	Program	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	
	1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6,916,579,000
	2 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,250,637,900
2	Program Pengembangan Kebudayaan	
	1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	175,000,000
	2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	132,000,000
	3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	429,776,000

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Padang Panjang

NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Paud dan
Pendidikan Non Formal

SOFYENI, S.Pd, M.Pd
NIP. 197503252006042002



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN SORI, SE

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASRUL, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

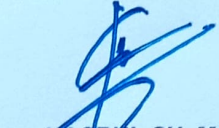
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pihak Pertama
Plt. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
Pendidikan


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 196910151989031003

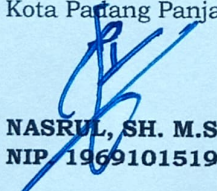

IRWAN SORI, SE
NIP. 196804082002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	4	5
	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan		
1	Terkelolanya Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan
2	Terkelolanya Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan
3	Terkelolanya Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sarana Prasarana Satuan Pendidikan anak usia dini yang	58 satuan pendidikan
4	Terkelolanya Sarana Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 satuan pendidikan

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4,366,181,402
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,433,485,000
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,000,099,000
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,457,737,900

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Padang Panjang


NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

Padang Panjang, 2 Januari 2025
 Kepala Bidang Sarana Prasarana Pendidikan


IRWAN SORI, SE
NIP. 196804082002121003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NORA MARINI, SH

Jabatan : KEPALA SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris

MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102142002121004

Pihak Pertama
Kasub Umum Dan Kepegawaian

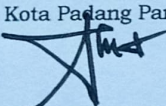
NORA MARINI, SH
NIP. 198003222009022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

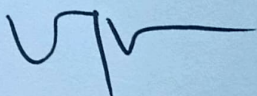
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		
	1 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		580 Paket
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit
	2 Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13 Unit
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	494,530,000
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,663,500
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129,047,314
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	76,986,650
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299,999,000
6	Pengadaan Mebel	99,680,000
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,931,800
8	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	19,928,500
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,023,700
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,999,584
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	894,168,000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189,992,000
13	Pemeliharaan mebel	25,000,000
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,740,000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499,954,000

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Padang Panjang


MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102142002121004

Padang Panjang, 2 Januari 2025
Kasubag Umum dan Kepegawaian


NORA MARINI, SH
NIP. 198003222009022001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. GATOT SUBROTO RT.8 KEL NGALAU NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128

Email: diknas.padangpanjang@gmail.com kode pos 27124

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUL, SH. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRI ARNIS

Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS



PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG





NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,7%	1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Literasi SD sederajat	92.11
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	97,5%			Numerasi SD sederajat	75.56
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	61%			Literasi SMP sederajat	82.30
		APK PAUD (3-6 tahun)	49%			Numerasi SMP sederajat	62.25
		APK SD sederajat	106,10%			Keamanan SD sederajat	76.91
		APK SMP sederajat	107%			Kebhinekaan SD sederajat	76.41
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	90.11 dan 72.56			Inklusifitas SD sederajat	61.13
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	80.30 dan 60.25			Keamanan SMP sederajat	74.43
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.74.91 b.73.41 c.59.13			Kebhinekaan SMP sederajat	72.45
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP	a.72.43 b.70.45 c.57.72			Inklusifitas SMP sederajat	59.72
						Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	55
2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	55%	2	Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase Pelestarian objek pemajuan kebudayaan	67.60%
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	65%				
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55%				
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya	60%				
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.50

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77,131,784,257.00	73,319,697,839.00	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	31,405,788,702.00	37,522,975,356.00	
3	Program Pengembangan Kebudayaan	736,776,000.00	643,712,000.00	
	Jumlah	109,274,348,959.00	111,486,385,195.00	


WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

Padang Panjang, 2025
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG**


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 196910151989031003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
JL. GATOT SUBROTO RT.8 KEL. NGALAU TELP. (0752) 82156, 82128
FAX. (0752) 82128 PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 -2026.

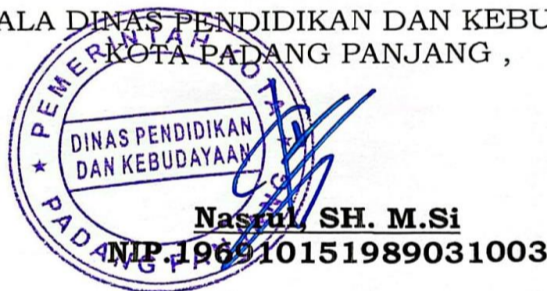
Lembar : Keputusan Kepala Disdikbud Padang Panjang
Kedua Nomor : 06 TAHUN 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG ,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
2. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
3. Kepala BPKD Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
4. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Disdikbud Padang Panjang.
 Nomor : 06 TAHUN 2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA PADANG PANJANG
 TAHUN 2024 - 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KET
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	Perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar disatuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7-12 di kota Padang panjang	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	Perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar disatuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di kota Padang panjang	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	%	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	Suatu indikator yang digunakan untuk melihat kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/Sederajat).	Persentase Peserta didik yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD terhadap seluruh anak yang sedang duduk dikelas 1 SD	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		APK PAUD (3-6 tahun)	%	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	Perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.	Jumlah peserta didik di jenjang PAUD sederajat usia 3-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 3-6 di kota Padang Panjang	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APK SD sederajat	%	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	Perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.	Jumlah peserta didik jenjang SD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun di kota Padang Panjang	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		APK SMP sederajat	%	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	Perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase.	Jumlah peserta didik jenjang SMP sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kota Padang Panjang	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	angka	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	Kompetensi Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) dan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) dan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	angka	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	Kompetensi Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) dan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) dan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	angka	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	a.Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. b.Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. c.Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	a.Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. b.Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. c.Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	angka	Kurang terjaminnya akses, mutu pendidikan	a.Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. b.Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. c.Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	a.Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. b.Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. c.Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	Rendahnya pelaku budaya yang berperan aktif melestarikan kebudayaan	Jumlah OPK yang dilestarikan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan	Jumlah OPK yang dilestarikan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	Rendahnya pelaku budaya yang berperan aktif melestarikan kebudayaan	Jumlah OPK yang dilestarikan dinagari	Jumlah OPK yang dilestarikan dibagi jumlah OPK yang ada dinagari kali seratus persen	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	Rendahnya pelaku budaya yang berperan aktif melestarikan kebudayaan	Jumlah CB yang dilestarikan	Jumlah CB yang dilestarikan dibagi jumlah CB yang ada kali seratus persen	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

2	Mendorong peningkatan aktifitas Adat dan Budaya	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	Rendahnya pelaku budaya yang berperan aktif melestarikan kebudayaan	Jumlah kelompok seni/komunitas budaya yang berkontribusi/bekerja sama dan diberdayaka masyarakat.	Jumlah kelompok seni/komunitas budayayang berkontribusi/bekerja sama dibagi jumlah kelompok seni/komunitas budaya yang ada kali seratus persen	Kebudayaa n	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
---	---	---	---	---	---	--	----------------	---------------------------------	--

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG ,



Nasrul SH. M.Si

NIP. 196910151989031003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
JL. GATOT SUBROTO RT.8 KEL. NGALAU TELP. (0752) 82156, 82128
FAX. (0752) 82128 PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 333 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- Mengingat
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang
 - 3 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 5 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 6 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
 - 7 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2).

Lembar : Keputusan Kepala Disdikbud Padang Panjang
Kedua Nomor : 333 TAHUN 2025
Tanggal : 19 November 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 19 November 2025.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG ,



Nasrul, SH. M.Si

NIP. 196910151989031003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
2. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
3. Kepala BPKD Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
4. Dan lain-lain dirasa perlu.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Disdikbud Padang Panjang.
 Nomor : 333 TAHUN 2025
 Tanggal : 19 November 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 - 2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)
1	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Literasi SD sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kompetensi Peserta didik SD berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi (Hasil Rapor Pendidikan)	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Numerasi SD sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		Literasi SMP sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kompetensi Peserta didik SMP berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Numerasi SMP sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Keamanan SD sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.	Persentase Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Kebhinekaan SD sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan	Persentase Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

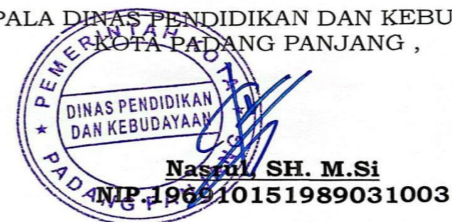
		Inklusifitas SD sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	Persentase Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Keamanan SMP sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.	Persentase Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Kebhinekaan SMP sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan	Persentase Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Inklusifitas SMP sederajat	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	Persentase Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	%	Kurang terjaminnya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan serta akses, mutu pendidikan	kriteria minimal mengenai fasilitas fisik yang wajib tersedia (lahan, bangunan, ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, tempat berolahraga) dan kelengkapan pendidikan (perabot, media, buku) untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	Rendahnya pelaku budaya yang berperan aktif melestarikan kebudayaan	segala bentuk peninggalan bernilai sejarah, estetika, dan identitas yang diwariskan turun-temurun, baik berupa benda (material) seperti candi, keris, batik, maupun tak benda (immateral) seperti tari tradisional, bahasa, adat istiadat, dan alat musik, yang dilindungi untuk mencegah kepunahan		Urusan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka	Untuk mengukur implementasi SAKIP dan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil	Skor hasil evaluasi penerapan AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menggambarkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta capaian organisasi dalam rangka wujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .	Nilai AKIP = 30% Perencanaan Kinerja + 30 Pengukuran Kinerja + 15% Pelaporan Kinerja + 25% Evaluasi Internal	Penunjang Urusan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Padang Panjang, 19 November 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG ,



Nasrul SH. M.Si

NIP. 196910151989031003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. GATOT SUBROTO RT.8 KEL. NGALAU NO. 1 TELP. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com kode pos 27124

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUL, SH. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA

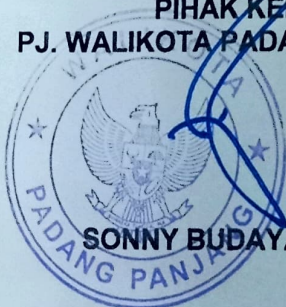
Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 2 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG



NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,7%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	98,55%
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	63%
		APK PAUD (3-6 tahun)	49%
		APK SD sederajat	106,10%
		APK SMP sederajat	109,45%
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	90.11 dan 78.60
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	91.15 dan 86.50
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.76.50 b.75.45 c.60.75
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	a.73.25 b.74.75 c.60.92
2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	55%
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	65%
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55%
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	60%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.131.784.257
2	Program Pengelolaan Pendidikan	31.405.788.702
3	Program Pengembangan Kebudayaan	736.776.000

WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 02 Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Padang Panjang



Nasrudin SH, M.Si
NIP. 196910151989031003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASRUL, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

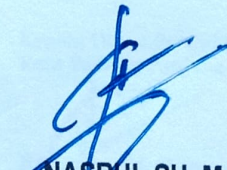
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

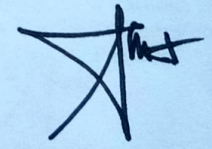
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 196910151989031003


MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102142002121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	4	5
1	Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai Dilaksanakan	100%
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Selesai dilaksanakan	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77,131,784,257
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74,166,140,209
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	494,530,000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	526,696,464
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169,540,300
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,050,191,284
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	724,686,000

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Padang Panjang

NASEDUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

Padang Panjang, 2 Januari 2025
 Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Padang Panjang

MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102142002121004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVAL JERRI, S.KOM. M.PdT

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASRUL, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

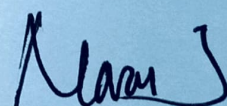
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 196910151989031003

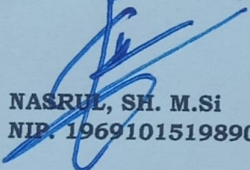

NOVAL JERRI, S.KOM. M.PdT
NIP. 198111072005011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	4	5
	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan		
1	Terkelolanya Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan
2	Terkelolanya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan

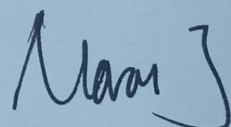
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10,033,722,000
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6,405,183,400

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Padang Panjang


NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar


NOVAL JERRI, S.KOM. M.PdT
NIP. 198111072005011003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFYENI, S.Pd, M.Pd

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN, PAUD DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASRUL, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

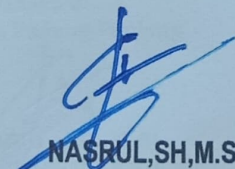
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

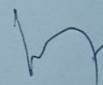
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pihak Pertama
**Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, PAUD
Dan Pendidikan Pendidikan Non Formal**


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 196910151989031003


SOFYENI, S.Pd, M.Pd
NIP. 197503252006042002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN, PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	4	5
1	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan		
	1	Terkelolanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola 58 satuan pendidikan
	2	Terkelolanya Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola 3 satuan pendidikan
2	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina		
	1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola 2 Objek
	2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan 3 Nagari
	3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina 3 lembaga

No	Program	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	
	1 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6,916,579,000
	2 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,250,637,900
2	Program Pengembangan Kebudayaan	
	1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	175,000,000
	2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	132,000,000
	3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	429,776,000

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Padang Panjang

NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Paud dan
Pendidikan Non Formal

SOFYENI, S.Pd, M.Pd
NIP. 197503252006042002



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN SORI, SE

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASRUL, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

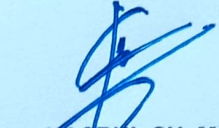
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pihak Pertama
Plt. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
Pendidikan


NASRUL, SH, M.Si
NIP. 196910151989031003

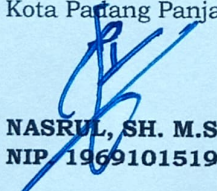

IRWAN SORI, SE
NIP. 196804082002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	4	5
	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan		
1	Terkelolanya Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	38 Satuan Pendidikan
2	Terkelolanya Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	13 Satuan Pendidikan
3	Terkelolanya Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Sarana Prasarana Satuan Pendidikan anak usia dini yang	58 satuan pendidikan
4	Terkelolanya Sarana Prasarana Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 satuan pendidikan

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4,366,181,402
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,433,485,000
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1,000,099,000
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,457,737,900

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Padang Panjang


NASRUL, SH. M.Si
NIP. 196910151989031003

Padang Panjang, 2 Januari 2025
 Kepala Bidang Sarana Prasarana Pendidikan


IRWAN SORI, SE
NIP. 196804082002121003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Gatot Subroto RT.8 Kel Ngalau Kota Padang Panjang Telp. (0752) 82156, FAX. (0752) 82128
Email: diknas.padangpanjang@gmail.com Kode Pos 27124.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NORA MARINI, SH

Jabatan : KEPALA SUB UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris

MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102142002121004

Pihak Pertama
Kasub Umum Dan Kepegawaian

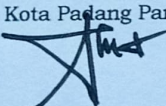
NORA MARINI, SH
NIP. 198003222009022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

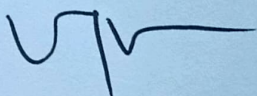
NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		
	1 Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		580 Paket
2	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit
	2 Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13 Unit
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	494,530,000
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,663,500
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129,047,314
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	76,986,650
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	299,999,000
6	Pengadaan Mebel	99,680,000
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,931,800
8	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	19,928,500
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,023,700
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,999,584
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	894,168,000
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189,992,000
13	Pemeliharaan mebel	25,000,000
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,740,000
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	499,954,000

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Padang Panjang


MUJI SIRWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 197102142002121004

Padang Panjang, 2 Januari 2025
Kasubag Umum dan Kepegawaian


NORA MARINI, SH
NIP. 198003222009022001

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Renstra 2024-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,70%	99.89%	99.89%	-	-	99.89%	100.19%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	98.55%	99.53%	99.53%	-	-	99.53%	100.99%		
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	63%	69.99%	69.99%	-	-	69.99%	111.09%		
		APK PAUD (3-6 tahun)	49%	69.99%	69.99%	-	-	69.99%	142.83%		
		APK SD sederajat	106,10%	100.30%	100.30%	-	-	100.30%	94.53%		
		APK SMP sederajat	109.45	107.21%	107.21%	-	-	107.21%	97.95%		
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	90.11 dan 78.60	87.76 dan 83.21	87.76 dan 83.21	-	-	87.76 dan 83.21	97.39 dan 105.86		
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	91.15 dan 86.50	92.23 dan 88.85	92.23 dan 88.85	-	-	92.23 dan 88.85	101.18 dan 102.71		
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.76.50	80.03	80.03	-	-	80.03	104.61		
			b.75.45	74.87	74.87	-	-	74.87	99.23		
c.60.75	61.74		61.74	-	-	61.74	101.62				
Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	a.73.25	70.76	70.76	-	-	70.76	96.60				
	b.74.75	69.76	69.76	-	-	69.76	93.36				

Renstra 2025-2029

1	Meningkatnya akses	Literasi SD sederajat	75.56	-	-	87.76	87.76	87.76	116.15		
---	--------------------	-----------------------	-------	---	---	-------	-------	-------	--------	--	--

	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Numerasi SD sederajat	75.56	-	-	83.21	83.21	83.21	110.12		
		Literasi SMP sederajat	82.3	-	-	92.23	92.23	92.23	112.07		
		Numerasi SMP sederajat	62.25	-	-	88.85	88.85	88.85	142.73		
		Keamanan SD sederajat	76.91	-	-	80.03	80.03	80.03	104.06		
		Kebhinekaan SD sederajat	76.41	-	-	74.87	74.87	74.87	97.98		
		Inklusifitas SD sederajat	61.13	-	-	61.74	61.74	61.74	101.00		
		Keamanan SMP sederajat	74.43	-	-	70.76	70.76	70.76	95.07		
		Kebhinekaan SMP sederajat	72.45	-	-	69.76	69.76	69.76	96.29		
		Inklusifitas SMP sederajat	59.72	-	-	60.61	60.61	60.61	101.49		
		Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	55	-	-	55	55	55	100.00		
2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	55%	0%	0%	-	-	0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	65%	0%	0%	-	-	0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55%	0%	0%	-	-	0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	60%	0%	0%	-	-	0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
2	Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase Pelestarian objek pemajuan kebudayaan	67,60	-	-	67,60	67,60	67,60	100		
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.5	-	-	-	-	-	-	Hasi Review belum ada	

Padang Panjang, Desember 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG,



PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,70%	99.89%				99.89%	100.19%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	98.55%	99.53%				99.53%	100.99%		
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	63%	69.99%				69.99%	111.09%		
		APK PAUD (3-6 tahun)	49%	69.99%				69.99%	142.83%		
		APK SD sederajat	106,10%	100.30%				100.30%	94.53%		
		APK SMP sederajat	109.45	107.21%				107.21%	97.95%		
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	90.11 dan 78.60	87.76 dan 83.21				87.76 dan 83.21	97.39 dan 105.86		
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	91.15 dan 86.50	92.23 dan 88.85				92.23 dan 88.85	101.18 dan 102.71		
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.76.50	80.03				80.03	104.61		
			b.75.45	74.87				74.87	99.23		
			c.60.75	61.74				61.74	101.62		
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	a.73.25	70.76				70.76	96.60		
			b.74.75	69.76				69.76	93.36		
c.60.92	60.61					60.61	99.49				
2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	55%	0%				0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	65%	0%				0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55%	0%				0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	60%	0%				0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan

Padang Panjang, April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOTA PADANG PANJANG,



PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,70%	99.89%	99.89%			99.89%	100.19%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	98.55%	99.53%	99.53%			99.53%	100.99%		
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	63%	69.99%	69.99%			69.99%	111.09%		
		APK PAUD (3-6 tahun)	49%	69.99%	69.99%			69.99%	142.83%		
		APK SD sederajat	106,10%	100.30%	100.30%			100.30%	94.53%		
		APK SMP sederajat	109.45	107.21%	107.21%			107.21%	97.95%		
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	90.11 dan 78.60	87.76 dan 83.21	87.76 dan 83.21			87.76 dan 83.21	97.39 dan 105.86		
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	91.15 dan 86.50	92.23 dan 88.85	92.23 dan 88.85			92.23 dan 88.85	101.18 dan 102.71		
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.76.50	80.03	80.03			80.03	104.61		
			b.75.45	74.87	74.87			74.87	99.23		
			c.60.75	61.74	61.74			61.74	101.62		
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	a.73.25	70.76	70.76			70.76	96.60		
b.74.75	69.76		69.76			69.76	93.36				
c.60.92	60.61		60.61			60.61	99.49				
2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	55%	0%	0%			0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	65%	0%	0%			0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55%	0%	0%			0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	60%	0%	0%			0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan

Padang Panjang, Juli 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG,



PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN III TAHUN 2025

Renstra 2024-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja Pada Triwulan ke-				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,70%	99.89%	99.89%	-	-	99.89%	100.19%		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	98.55%	99.53%	99.53%	-	-	99.53%	100.99%		
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	63%	69.99%	69.99%	-	-	69.99%	111.09%		
		APK PAUD (3-6 tahun)	49%	69.99%	69.99%	-	-	69.99%	142.83%		
		APK SD sederajat	106,10%	100.30%	100.30%	-	-	100.30%	94.53%		
		APK SMP sederajat	109.45	107.21%	107.21%	-	-	107.21%	97.95%		
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	90.11 dan 78.60	87.76 dan 83.21	87.76 dan 83.21	-	-	87.76 dan 83.21	97.39 dan 105.86		
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	91.15 dan 86.50	92.23 dan 88.85	92.23 dan 88.85	-	-	92.23 dan 88.85	101.18 dan 102.71		
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.76.50	80.03	80.03	-	-	80.03	104.61		
			b.75.45	74.87	74.87	-	-	74.87	99.23		
c.60.75	61.74		61.74	-	-	61.74	101.62				
Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sec	a.73.25	70.76	70.76	-	-	70.76	96.60				
	b.74.75	69.76	69.76	-	-	69.76	93.36				

Renstra 2025-2029

1	Meningkatnya akses	Literasi SD sederajat	75.56	-	-	87.76		87.76	116.15		
---	--------------------	-----------------------	-------	---	---	-------	--	-------	--------	--	--

	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Numerasi SD sederajat	75.56	-	-	83.21	83.21	110.12		
		Literasi SMP sederajat	82.3	-	-	92.23	92.23	112.07		
		Numerasi SMP sederajat	62.25	-	-	88.85	88.85	142.73		
		Keamanan SD sederajat	76.91	-	-	80.03	80.03	104.06		
		Kebhinekaan SD sederajat	76.41	-	-	74.87	74.87	97.98		
		Inklusifitas SD sederajat	61.13	-	-	61.74	61.74	101.00		
		Keamanan SMP sederajat	74.43	-	-	70.76	70.76	95.07		
		Kebhinekaan SMP sederajat	72.45	-	-	69.76	69.76	96.29		
		Inklusifitas SMP sederajat	59.72	-	-	60.61	60.61	101.49		
		Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	55	-	-	55	55	100.00		
2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	55%	0%	0%	-	0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	65%	0%	0%	-	0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55%	0%	0%	-	0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	60%	0%	0%	-	0%	0	Kegiatan Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan
2	Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase Pelestarian objek pemajuan kebudayaan	67,60	-	-	67,60	67,60	100		
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.5	-	-	-				

Padang Panjang, Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG,



Nasrul SH. M.Si

NIP. 196910151989031003

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	PROSES PENYELESAIAN	KENDALA	BUKTI DUKUNG
A	<p>A. Perencanaan kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website resmi pemerintah daerah, 2. Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 3. Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja. 4. Melakukan penyesuaian keterkaitan antara indikator kinerja dengan isu strategis 	Menyusun Perjenjangan Kinerja perangkat daerah dengan menggunakan logical framework dan mengidentifikasi CSF dalam pencapaian tujuan	1 dokumen		Sekretariat	Sudah ditindak lanjuti melalui penyusunan renstra baru		Renstra 2025-20229
B	<p>B. Pengukuran Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) ikut terlibat dalam memonitoring capaian 	Pimpinan organisasi memperhatikan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam	1 dokumen		Sekretariat	1. Ada beberapa rekomendasi yang telah didindaklanjuti dan ada Dalam proses penyelesaian seperti		

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSAN AAN	PENANGGUNG JAWAB	PROSES PENYELESAIAN	KENDALA	BUKTI DUKUNG
	<p>kinerja secara berkala.</p> <p>2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengumpulan data kinerja.</p> <p>3. Memanfaatkan basil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian <i>reward and punishment</i>, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.</p> <p>4. Melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan).</p> <p>5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.</p> <p>6. Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.menpan.go.id.</p>	<p>pemberian reward dan punishment serta sebagai dasar dalam penentuan strategi, pencapaian target kinerja kedepan dan pola pengembangan serta mutasi rotasi bagi pegawai</p>				<p>Memanfaatkan basil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian <i>reward and punishment</i>, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai</p>		
	<p>C. Pelaporan Kinerja</p> <p>1. Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja tepat waktu.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas laporan</p>	<p>Menyusun laporan kinerja dan mempublikasikan laporan</p>	<p>1 dokumen/laporan</p>		<p>Sekretariat</p>	<p>Dalam proses penyelesaian</p>		

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	PROSES PENYELESAIAN	KENDALA	BUKTI DUKUNG
	kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>). 3.							
	D.Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 1. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan implementasi SAKIP	Menyusun Matriks Tindak Lanjut terkait rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk peningkatan implementasi SAKIP		1 dokumen	Sekretariat	Dalam proses penyelesaian		

Padang Panjang, Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Padang Panjang



Nasrul, S.Pd, M.Si

NIP. 196910151989031003